

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Nurul Hidayati & Fidiana (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (komisaris independen, komite audit, kualitas audit) terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen *corporate social responsibility* (CSR) yang diproksikan dengan CSRDI, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit (ukuran KAP) terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Current ETR*.

Sampel yang digunakan adalah terdiri atas 11 perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 44 dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*)

dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayanti & Fidiana (2017) adalah CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Berikut adalah perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan atau adanya koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

2. **Renata Wandroski Peris, Eduardo Contani, Jose Roberto Ferreira Savoia dan Daniel Reed Bergmann (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara penerapan praktik tata kelola perusahaan dan kinerja operasional di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Brasil. Sampel penelitian terdahulu yaitu Sampel terdiri dari 80 perusahaan terbesar di nilai pasar hadir dalam Indeks Saham Brasil pada tahun 2014. Teknik analisis data menggunakan kluster analisis teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan struktur modal, dan model regresi diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel kunci. Hasil penelitian bahwa Tata Kelola Perusahaan berpengaruh Kinerja Operasional. Penelitian ini dimotivasi dengan Tingginya biaya penataan dan penempatan untuk penawaran umum kontribusi untuk membuat kehadiran perusahaan menengah di nya pasar modal lebih sulit. Di antara negara-negara berkembang, Brasil menonjol untuk menjadi salah satu perekonomian terbesar dan memiliki pertumbuhan yang kuat dalam penataan perusahaan yang terdaftar dengan praktek tata kelola perusahaan (Hitam et al., 2012).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan variabel independen Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Sedangkan perbedaannya terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen Kinerja operasional sedangkan peneliti yang sekarang menggubakan dependen *Tax Avoidance*. Sampel penelitian terdahulu semua perusahaan yang terdaftar Indeks Saham Brasil periode 2014, sedangkan

penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017.

3. Viola Tanto (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai krisis ekonomi keuangan yang dipicu oleh kontribusi pajak yang dijadikan sebagai penggelapan pajak, penipuan pajak dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan multinasional yang terdiri dari OECG dan G20. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viola Tanto (2016) adalah perusahaan multinasional mampu mengurangi beban pajak mereka atas laba melalui rencana penghematan pajak dan *tax heavens* memainkan peran penting dalam konteks penghindaran praktik pajak yang merupakan pemain global tanpa cabang.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan *tax heavens* dan penipuan pajak, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan atau adanya koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

- b. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu perusahaan multinasional OECD dan G20. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

4. Dianing Ratna Wijayani (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *CETR (Cash Effective Tax Rate)*, *ROA (return on assets)*, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan. Sampel yang digunakan adalah seluruh barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianing Ratna Wijayani (2016) adalah Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:
 - a. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

5. **Shawn Xu dan Kenneth Zheng (2016)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penghindaran pajak dan perilaku biaya asimetris. Variabel yang digunakan dari penelitian ini adalah penghindaran pajak dan biaya asimetri. Teknik analisis data yang digunakan adalah *robustness test* yang digunakan untuk memverifikasi apakah hasil yang sensitif terhadap langkah-langkah alternatif dari penghindaran pajak, perubahan penghindaran (Cahyono, Andini, & Rahajo, pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, 2016) pajak, atau termasuk efek utama dalam model diperluas. Peneliti menjalankan tes ketahanan ini untuk memastikan hasil tidak tergantung pada pilihan menghindari ukuran pajak serta

untuk mengurangi masalah *endogeneity* dan berkorelasi masalah variabel dihilangkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian arus kas masa depan berkenaan dengan penghindaran pajak yang lebih berat dapat memperburuk hubungan negatif antara penghindaran pajak dan perilaku biaya asimetris. Penelitian ini dimotivasi untuk hubungan antara penghindaran pajak dan keputusan penyesuaian biaya manajer, khususnya yang berkaitan dengan masalah perilaku biaya. Pengungkapan bahwa biaya rata-rata meningkat lebih ketika aktivitas meningkat dari yang mereka inginkan serta menurun ketika aktivitas jatuh oleh jumlah yang setara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen penghindaran pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan perilaku biaya asimetris terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dengan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis *Smart PLS*.

6. Uun Sunarsih & Kartika Oktaviani (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dan *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 10 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data skunder yang dapat diunduh melalui www.idx.com dan www.sahamok.com. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Uun Sunarsih & Kartika Oktaviani (2016) adalah penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan konstitusional, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan atau adanya koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

7. Masripah, Vera Diyanty & Debby Fitriasaki (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek *tax avoidance* dari pengendalian pemegang saham, serta melihat seberapa besar kepemilikan keluarga, efektivitas komisaris, komite audit dan kualitas audit eksternal. Sampel yang digunakan adalah terdiri dari 70 perusahaan dengan periode observasi 2010 hingga 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masripah, Vera & Debby (2016) adalah menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, pengendalian internal, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

sementara dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan kepemilikan keluarga dan kepemilikan konstitusional, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan atau adanya koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

8. Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagolinzer dan David F. Lacker (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak

Abstrak: Kami

meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan, insentif manajerial, dan penghindaran pajak perusahaan. Variabel independen meliputi Tata Kelola Perusahaan dan Insentif. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik primer. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari semua perusahaan yang terdaftar di Compustat untuk tahun fiskal 2007-2011.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peneliti tidak menemukan hubungan antara berbagai mekanisme tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak di mean bersyarat dan median dari distribusi penghindaran pajak. Namun, dengan menggunakan regresi kuantil, kita menemukan hubungan positif antara dewan komisaris dan kecanggihan keuangan untuk tingkat rendah penghindaran pajak, tetapi hubungan negatif untuk tingkat tinggi penghindaran pajak. Penelitian ini dimotivasi untuk meneliti peran pemerintahan dalam keputusan perencanaan pajak guna membantu menyelesaikan perdebatan di pemerintahan dan pajak literatur tentang apakah ada hubungan antara perusahaan perusahaan struktur pemerintahan, termasuk kontrak insentif-kompensasi manajer, dan pajak perusahaan penghindaran. Perdebatan ada, sebagian, karena penelitian sebelumnya mengandalkan Desai dan Dharmapala (2006) teori yang menyediakan prediksi berlawanan tentang hubungan antara pemerintahan dan keputusan penghindaran pajak. Secara khusus, Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa penghindaran pajak dan ekstraksi sewa manajerial dapat saling melengkapi jika penghindaran pajak mengurangi perusahaan transparansi yang, pada gilirannya, meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan sumber

daya perusahaan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, teori mereka menunjukkan bahwa mengurangi perencanaan pajak dapat secara bersamaan mengurangi pengalihan manajerial. Desai dan Dharmapala lebih lanjut mengasumsikan bahwa perusahaan baik-diatur adalah lebih cenderung memiliki mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyelewengan tersebut dan berpendapat bahwa hubungan negatif antara insentif ekuitas manajer dan penghindaran pajak hanya akan terwujud dalam baik-diatur perusahaan. Sebaliknya, mereka menganggap bahwa perusahaan buruk diatur tidak akan menggunakan ekuitasinsentif untuk mendorong penghindaran pajak karena mereka tidak memiliki mekanisme pemerintahan untuk mencegah pengalihan manajerial.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dependen *tax avoidance* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan semua perusahaan yang terdaftar Compusat pada tahun

fiscal 2007 sampai 2011. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan menggunakan sampel dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

9. Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu dan Siti Normala Sheikh Obid (2014)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki empiris dalam hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Variabel independen yang digunakan yaitu struktur kepemilikan perusahaan. Variabel dependen yang digunakan yaitu Tax Avoidance. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi Perusahaan-perusahaan Malaysia yang terdaftar di pasar utama Bursa Malaysia yang berada di bawah pengawasan ketat dari Dewan dan mereka harus memenuhi semua persyaratan pencatatannya pada periode 2009-2013. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini dimotivasi untuk memahami faktor-faktor penentu penghindaran pajak antara wajib pajak badan. Khususnya untuk memahami variasi dalam perusahaan beban pajak diseluruh industri. Namun, studi mengasumsikan bahwa perusahaan membuat keputusan pelaporan pajak mereka dengan tidak ada pertimbangan lembaga dan pengaruh dari dewan komisaris (yaitu diberikan pertimbangan legitimasi organisasi). Oleh karena itu, mereka memberikan sedikit wawasan untuk faktor-faktor penentu penghindaran pajak dalam pengaturan perusahaan dimana ada pemisahan kepemilikan dari kontrol dan legitimasi masalah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan variable yang sama yaitu menggunakan variable dependen *Tax Avoidance*.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variable independen struktur kepemilikan perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan populasi semua perusahaan yang terdaftar di pasar Bursa Malaysia selama periode 2009-2013 Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

10. K. Hung Chan, Phyllis L. L Mo, Amy Y. Zhou (2013)

Penelitian (chan, mo, & zhou, 2013) bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian terdahulu yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan *Shenzen Stock Exchange* periode 2003-2009. Teknik analisis data menggunakan OLS regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dimotivasi untuk meneliti bagaimana kepemilikan pemerintah

dan tata kelola perusahaan yang berdampak pada suatu perusahaan yang menggunakan agresivitas pajak di Cina. Peneliti memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang memengaruhi kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak karena kontrol pemerintah dari perusahaan meresap di sebagian besar perekonomian transisi.

Persamaan penelitian chan, mo, & zhou, (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan variabel dependen *Tax avoidance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel penelitian terdahulu menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen Stock Exchanges periode 2003-2009, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017.

11. Renata Nogueira Braga (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara wajib Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adopsi dan penghindaran pajak perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dari penelitian ini adalah penghindaran pajak dan penerapan IFRS sebagai variabel independen. Kepemilikan institusional sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Regresi Model Spesifikasi. Peneliti menggunakan sampel yang berkisar dari 9389 ke 15.423 perusahaan publik yang diperdagangkan dari 35 negara, meliputi tahun 1999 sampai tahun 2014.

Hasil dari penelitian menunjukkan hubungan antara adopsi IFRS dan peningkatan penghindaran pajak menunjukkan signifikansi secara independen dari tingkat kesesuaian buku-pajak diperlukandi negara dan volume akrual perusahaan. Penelitian ini dimotivasi untuk menyelaraskan informasi keuangan perusahaan. Harapannya mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah untuk meningkatkan transparansi dan komparatif dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum, sehingga memungkinkan modal dan pasar kredit untuk berfungsi lebih efisien.

Mengingat manfaat yang diharapkan dari adopsi IFRS, lebih dari 120 negara telah mengadopsi set norma-norma internasional (IFRS Foundation, 2017). Sementara berbagai penelitian berusaha untuk mengidentifikasi apakah ada manfaat informasi dari adopsi IFRS dan apa ini, efek perpajakan terkait adopsi ini telah hampir dieksplorasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variable dependenyang sama, yaitu menggunakan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini menggunakan Penerapan IFRS sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian terdahulu variabel independen Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen.

12. Ahmed Zemzem dan Khaoula Ftouhi (2013)

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmed Zemzem dan Khaoula Ftouhi (2013) yang berjudul "*The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness*" Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkat bahwa investor

menyadari bahwa agresivitas pajak memiliki dampak merugikan pada hasil investasi mereka. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Karakteristik Dewan Komisaris. Sedangkan variabel dependen adalah *Tax Avoidance* atau *Tax aggressiveness*. Populasi yang digunakan adalah 73 perusahaan Perancis pada indeks SBF 120 untuk periode 2006-2010. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komposisi Dewan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pajak telah secara luas dianggap sebagai faktor memotivasi dalam banyak keputusan perusahaan. Ini telah menerima banyak perhatian dalam literatur terbaru. Hal ini semakin diharapkan dari perusahaan yang mereka menunjukkan kepada investor bahwa mereka mematuhi aturan dan peraturan pajak, karena investor menyadari bahwa agresivitas pajak memiliki efek yang merugikan pada hasil investasi mereka. Tata Kelola memainkan peran penting dalam memilih strategi manajemen pajak menemukan bahwa hukum pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan menawarkan hak istimewa atau memaksakan menemukan bahwa hukum pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan menawarkan hak istimewa atau memaksakan hukuman. Dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak sering mengakibatkan, struktur pajak-didorong tidak transparan dan kompleks.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Variabel yang digunakan yaitu agresivitas pajak atau penghindaran pajak

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teori Agresivitas Pajak sedangkan peneliti sekarang menggunakan Teori agensi.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan independen proporsi dewan komisaris sedangkan peneliti sekarang menggunakan Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen.

13. Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew (2010)

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji apakah eksekutif puncak individu memiliki efek tambahan pada penghindaran pajak perusahaan-perusahaan mereka yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan. Variabel yang digunakan dari penelitian ini adalah *EBITDA*, *R&D*, *Advertising*, *SG&A*, *Capital expenditure*, *Percentage change in sale*, *Leverage*, *Cash holdings*, *Foreign operation* sebagai variabel independen dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis statistik deskriptif.

Pada penelitian ini terdapat sampel penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Semua eksekutif yang terdaftar di database ExecuComp dari tahun 1992 hingga 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing eksekutif memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti ini disebabkan karena munculnya eksekutif untuk menekankan penghindaran pajak hanya membuat perusahaan-perusahaan mereka mengambil risiko pajak yang cukup besar. Dalam hal ini, kita mungkin

mengharapkan untuk melihat pajak tambahan dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai perusahaan-perusahaan mengalami audit oleh IRS, mungkin pada jam lain eksekutif. Akan menarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada prospek karir eksekutif yang menekankan penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki variabel independen yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *EBITDA, R&D, Advertising, SG&A, Capital expenditure, Percentage change in sale, Leverage, Cash holdings, Foreign operation* sebagai variabel independen.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan landasan dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli.

2.2.1 *Theory Agency*

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen

perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro 2005 dalam Brian & Martani, 2014).

Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan masalah agensi di dalam perusahaan (Jensen & Mecklin, 1976). Namun, pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya pada publik, secara otomatis akan terjadi masalah agensi di dalam perusahaan. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan.

Teori ini menyatakan terdapat adanya pemisahan fungsi antara pemilik dengan organisasi dalam pengelolaan organisasi. Seperti yang diketahui bahwa organisasi dikelola oleh pengelola yang bukan pemilik, maka akan terjadi perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Wilopo 2014:229). Masalah keagenan (*agency problem*)

muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) antara pengelola dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah keagenan tidak hanya timbul antara pemilik dengan manajemen, tetapi juga bisa timbul antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, atau diantara pemegang saham dengan pihak kreditor ketika perusahaan di likuidasi (Sudana, 2015:13). Agar pengelola organisasi melakukan tugas dengan keinginan pemilik, maka pemilik perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan pengelola, memberikan gaji dan kompensasi yang sesuai kepada pengelola dan membuat sistem pengendalian organisasi agar pengelola dapat bekerja dengan jujur. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya keagenan (*agency cost*) (Wilopo 2014:229). Menurut wirahadi dan sepriani (2008) terdapat tiga macam biaya keagenan (*agency cost*) yaitu:

1. *Monitoring cost* yaitu biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent* dengan cara mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Biaya yang dimaksud seperti biaya audit, biaya penetapan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran dan aturan-aturan operasi.
2. *Bonding Cost* yaitu biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk mematuhi mekanisme yang menjamin *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*. Biaya yang dimaksud yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada para pemegang saham, tetapi pemegang saham akan mengizinkan terjadinya *bonding cost* apabila dapat mengurangi *monitoring cost*.

3. *Residual Cost* yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tindakan *agent* yang berbeda dari tindakan yang seharusnya yaitu memaksimalkan kepentingan *principal*.

Teori agensi berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang bisa terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul bila a) keinginan atau tujuan pokok dan konflik *agent* dan b) sulit atau mahal biaya bagi *principal* untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya *agent* lakukan. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul ketika *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. *Principal* dan *agent* dapat memilih tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, *principal* menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba untuk dialokasikan ke pembagian dividen. Teori agensi mengingatkan kita bahwa sebagian besar kehidupan organisasi didasarkan pada kepentingan pribadi, oleh karena itu pentingnya insentif dan kepentingan pribadi harus dibangun dalam pemikiran organisasi (Jensen and Mackling, 1971)

Keterkaitan Tax Avoidance dengan teori agensi dimana perusahaan dapat meminta pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak tetapi tidak sampai menimbulkan risiko denda dan kehilangan reputasi. Manajer memiliki andil dalam keputusan penghindaran pajak, dalam perusahaan terdapat eksekutif yang berani mengambil risiko dan yang tidak. Perusahaan biasanya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak agar dapat

meminimalisir beban pajak, semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunga juga semakin tinggi dan penghasilan kena pajak semakin rendah. Selain itu teori agensi merupakan teori yang relevan dalam penelitian ini karena menjelaskan fungsi dewan komisaris dan komite audit dalam struktur *Good Corporate Governance* sebagai pemonitor dan mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan (Fujianti, 2016). Monitoring ini berkaitan dengan praktek *Good Corporate Governance* dan pelaporan keuangan sebagai proses pertanggungjawaban kinerja agen (Shukeri & Nelson, 2011).

2.2.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti diungkapkan oleh Slamet (2007): (i) adanya tujuan usaha yang baik/tidak, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak/bukan, (iii) sesuai/tidak dengan *spirit & intention of parliament*, (iv) melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sedangkan Brian dan Michael (2012) membedakan *tax planning* menjadi *defensive tax planning* yang merupakan *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menempatkan ahli atau penasihat perpajakan dan dilakukan hanya berdasarkan undang-undang domestik, dan *offensive tax planning* yang menempatkan tenaga ahli sebagai penasihat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori *tax heaven countries*.

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng, et al (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak. Penghindaran pajak adalah bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 2013). Ini berbeda dengan *tax evasion* dimana *tax evasion* merupakan penggelapan pajak dan merupakan usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. *Tax evasion* bersifat ilegal dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Di Indonesia wajib pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini karena diterapkan adanya peranan *sistem self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan *sistem self assessment* seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang merupakan wajib pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua dengan memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan cara penggelapan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukakn sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan ukuran penghidaran pajak dengan ETR dan cash ETR disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya current federal tax expense dan current foreign tax expense, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR, seperti halnya penelitian Hanlon dan heitzman (2010), Graham & Tucker (2006), Desai & Dharmapala (2006), Dyreng, Hanlon & Maydew (2008), Richardson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen et al. (2010) dan Minnich & Noga (2012). Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian diatas menyatakan bahwa terdapat beberapa cara dalam pengukuran tax avoidance yang umumnya digunakan, dimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
PENGUKURAN TAX AVOIDANCE

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Pajak periode } t - \text{pajak periode } (t - 1)}{\text{Pajak periode } (t - 1)}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income.</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income.</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income.</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Word wide current income tax expense}}{\text{Word wide total pre-tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid overn years divided by the sum of pre-tax earning overn years.</i>
5	ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The different of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR.</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTB	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
8	Temporary BTB	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
9	Abnormal total BTB	$\text{Residual from BTB/TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Tarjo dalam Bernandhi (2013) menerangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus dalam Fandini (2013) Kepemilikan Institusional adalah beberapa saham dipegang langsung oleh para investor individu tetapi proposisi yang besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti reksa dana, dana pensiun dan perusahaan asuransi.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menyuji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang

saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengaman ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang memntingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

2.2.4 Kualitas Audit

Kepemilikan Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah diterapkan. Dalam penerapannya dilapangan, kualitas audit adalah segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan.

Laporan keuangan menggunakan presepsi bahwa kualitas audit menggambarkan tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki seorang auditor. Kompetensi ini berkaitan dengan pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan yang pernah ditempuh oleh seorang auditor. Oleh sebab itu, auditor harus bertindak profesional di bidang akuntansi dan audit. Sedangkan, independensi

merupakan komponen etika yang harus dipelihara oleh seorang auditor. Independensi berarti auditor bebas bekerja dan tidak berada dibawah pengaruh suatu pihak karena kewajiban utama seorang auditor yaitu melayani masyarakat.

Dengan semakin tingginya tuntutan akan transparansi keuangan terhadap perusahaan maka proses audit yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu elemen yang penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai transparansi adalah dengan memperhatikan kualitas audit, kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, Dewi & Jati (2014). Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan orang yang independen. Auditor yang berkompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pengauditan adanya sikap profesionalisme, akuntabilitas, integritas maupun transparansi. Keempat faktor ini menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas audit. Transparansi sebagai salah satu unsur dari tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas audit, hal ini disebabkan karena dengan adanya transparansi maka pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih berkualitas tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor afiliasi *non big four*. KAP *big four* terdiri dari :

1. Ernst & Young
2. Deloitte Touche Tohmatsu
3. Price Waterhouse Coopers
4. KMPG

Adapun Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* adalah :

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja – affiliate of Ernst & Young.
2. KAP Osman Bing Satrio – affiliate of Deloitte
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja – affiliate of KMPG
4. KAP Haryanto Sahari – affiliate of PwC

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No.5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etikan Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

2.2.5 Komite Audit

Komite Berdasarkan Keputusan Ketap Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September, perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah

komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Salah seorang anggota memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksudkan yaitu pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan. Independen berarti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah salah satu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

2.2.6 Dewan Komisaris Independen

Kepemilikan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan perseroan menganut sistem dua beban (*two boards system*), yaitu dewan komisaris dan direksi, yang memiliki

wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana dimanfaatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Menjelaskan kembali bahwa pada perseroan terbatas tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya kepengurusan, dan memberikan nasihat kepada direktur untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, dewan komisaris harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mempertahankan independensinya.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Adapun yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.3 Pengaruh antar Variabel

1. **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.**

Kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer. Apabila terdapat kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam membuat dan pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara kepemilikan institusional terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham yang dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dengan manajemen. Dimana pemegang saham menginginkan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan yang terjadi sebenarnya sedangkan manajemen ingin pengungkapan laporan keuangan dengan proporsi bonus yang lebih besar.

Kepemilikan oleh pihak konstitusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional bisa mencegah terjadinya *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional tersebut maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan,

dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi pada kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Hasil Penelitian yang dilakukan Jenae Atari (2016), Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan Trihadus Susanto (2015), Fenny Winata (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Kualitas audit adalah kerangka dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi tersebut (Fairchild, 2008). Dalam kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin realibilitas informasi.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara kualitas audit terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen terkait pemilihan audit

eksternal. Dimana pemegang saham menginginkan laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP yang berafiliasi Big Four karena untuk mendukung kredibilitas laporan keuangan, sementara manajemen menginginkan laporan keuangan di audit oleh KAP yang Non Big Four karena untuk menghasikan opini wajar tanpa pengecualian.

Perusahaan yang melakukan upaya pelaporan pajak dibayarkan oleh perusahaan terlalu rendah, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Namun apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut diyakini tidak akan melakukan penghindaran pajak yang terlalu agresif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jayanti (2014), Annisa dan Lulus (2012) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Susanto (2015), Fadhillah (2014) dan Kurniasih & Sari (2013) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperluakan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku (Hanggraeni, 2015). Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan

kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan kekurangefektifan peran komite audit pada perusahaan

Dalam kaitannya dengan hubungan antara komite audit terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen terkait komite audit. Dimana pemegang saham menginginkan bahwa komite audit (audit internal) pada perusahaan minimal sebanyak 3 (tiga orang) untuk mencegah tindakan kecurangan audit, sementara manajemen menginginkan komite audit tidak lebih dari 3 (tiga orang) untuk mengaudit laporan keuangan internal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Keberadaan Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Effendi, 2016).

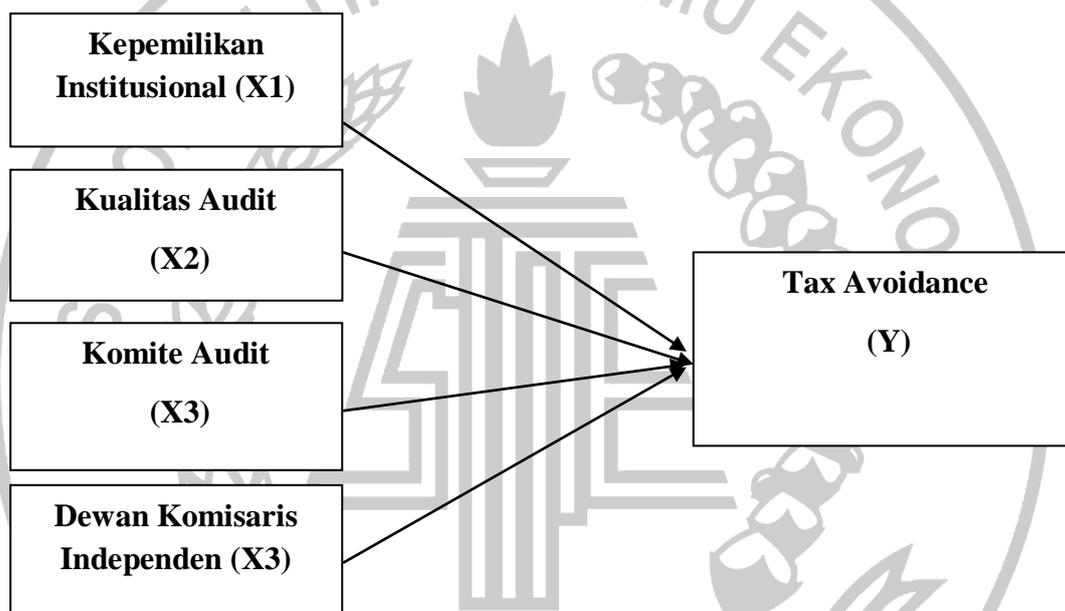
Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap adanya potensi penghindaran pajak. Bentuk keefektifan peran komisaris independen salah satunya adalah perusahaan melaksanakan kewajibannya secara utuh termasuk kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam kaitannya dengan hubungan antara kualitas audit terkait dengan teori agensi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen terkait dewan komisaris independen. Dimana pemegang saham mengangkat langsung dan membuat susunan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan untuk mengawasi kinerja laporan keuangan perusahaan, sementara manajemen menginginkan bahwa *top management* dan dewan komisaris sudah cukup untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada setiap penelitian akan memiliki suatu kerangka pemikiran yang dimana dalam penelitian ini memiliki kerangka pemikiran dimana Kepemilikan Institusional (X_1), Kualitas Audit (X_2), Komite Audit (X_3), Dewan Komisaris Independen (X_4) yang mempengaruhi *Tax Avoidance* (Y). Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber: Diolah

GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

- H2: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- H3: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- H4: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

